

**PERAN GURU PPKn TERHADAP PENEGAKAN TATA TERTIB
SEKOLAH PADA SISWA SMA NEGERI 4 GOWA**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan*

Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

Ahmad Shalahuddin

NIM 10543 0035 14

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
2019**



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Ahmad Shalahuddin**, NIM 10543003514 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 063 Tahun 1440 H/2019 M pada tanggal 26 Syawwal 1440 H/29 Juni 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2019.

26 Syawwal 1440 H

Makassar,

26 Juni 2019 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., MM.
2. Ketua : Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
3. Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd.
4. Penguji : 1. Dr. Muhajir, M.Pd.
2. Drs. H. Nurdin, M.Pd.
3. Drs. H. Andi Baso, M.Pd.f.
4. Dra. Jumiati Nur, M.Pd.

(Handwritten signatures and initials of the exam committee members)

Disahkan oleh :

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

(Signature of Erwin Akib)
Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

(Signature of Dr. Muhajir)
Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Guru PPKn Terhadap Penegakan Tata Tertib Sekolah Pada Siswa SMA Negeri 4 Gowa

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Ahmad Shalahudin
Stambuk : 10543003514
Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan.

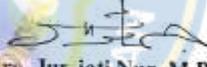
Makassar, 1 Juli 2019

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Nasrun Hasan, M.Pd.


Dra. Juriati Nur, M.Pd.

Diketahui oleh:

Dekan FKIP
Unisriuh Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NIM. 860934


Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988461



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Ahmad Shalahuddin

NIM : 10543 0035 14

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Judul Skripsi : Peran Guru PPKn Terhadap Penegakan Tata Tertib Sekolah Pada SMA
Negeri 4 Gowa

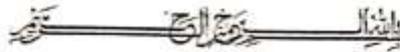
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan

Ahmad Shalahuddin
10543 0035 14



SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Shalahuddin
NIM : 10543 0035 14
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Mei 2019

Yang Membuat Perjanjian

Ahmad Shalahuddin
10543 0035 14

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kemalasan Adalah Faktor

Dari Sebuah Kegagalan

Maka Kegagalan Terjadi Karena

Terlalu Banyak Berencana Tapi Sedikit Berpikir.



Kupersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang Tuaku, Saudariku, dan Sahabatku,

Atas keikhlasan dan doanya dalam mendukung penulis

Mewujudkan harapan untuk menjasi sebuah kenyataan.

ABSTRAK

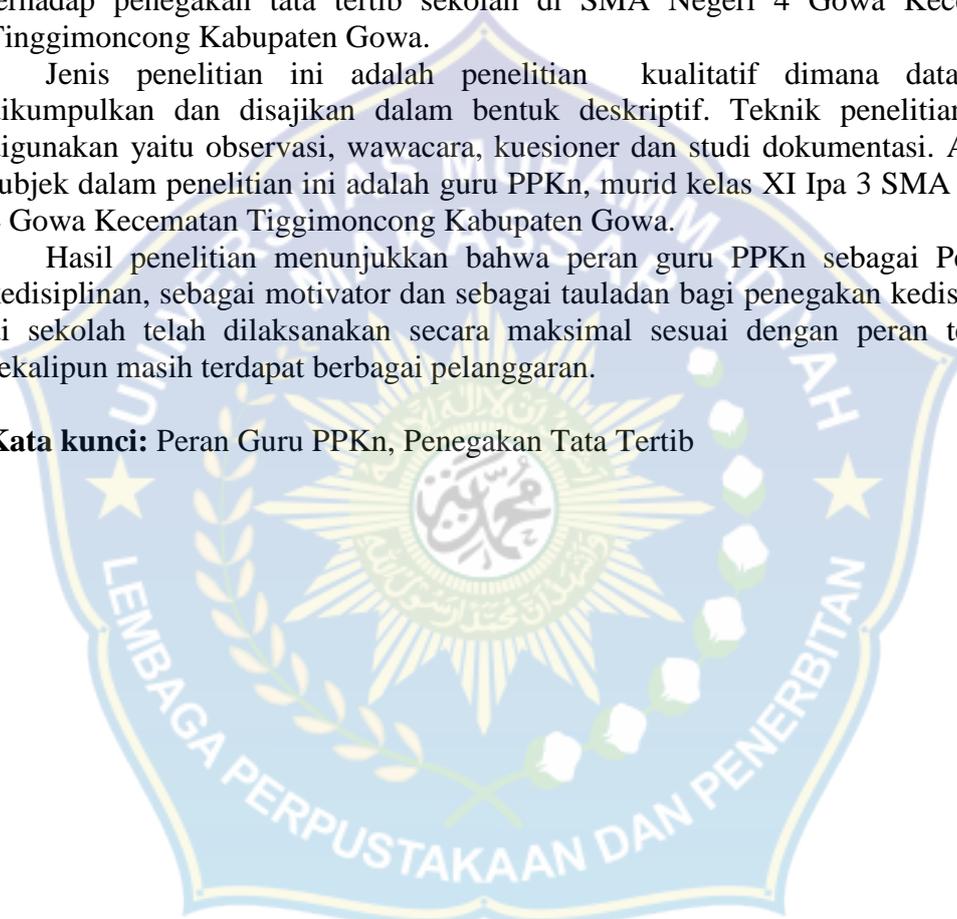
Ahmad Shalahuddin. 2019. *Peran Guru PPKn Terhadap Penegakan Tata Tertib Sekolah Pada Siswa SMA Negeri 4 Gowa*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Nasrum Hasan dan pembimbing II Jumiati Nur.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Guru PPKn terhadap penegakan tata tertib sekolah serta bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib di SMA Negeri 4 Gowa Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru PPKn terhadap penegakan tata tertib sekolah di SMA Negeri 4 Gowa Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana data yang dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara, kuesioner dan studi dokumentasi. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah guru PPKn, murid kelas XI Ipa 3 SMA Negeri 4 Gowa Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru PPKn sebagai Pembina kedisiplinan, sebagai motivator dan sebagai tauladan bagi penegakan kedisiplinan di sekolah telah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan peran tersebut sekalipun masih terdapat berbagai pelanggaran.

Kata kunci: Peran Guru PPKn, Penegakan Tata Tertib



KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Tak cukup kata merangkai puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah menciptakan langit dan bumi serta isinya tanpa saksi, yang menciptakan makhluk tanpa pembantu, tidak ada sekutu dalam keahliannya dan tiada setara dalam keesaannya. Keluh lidah untuk mengungkap keagungan-Nya, merendahkan segala sesuatu karena kehebatannya, merunduk segala sesuatu karena takut kepadanya. Dia yang mengusik malam gelap dengan kodrat-Nya, yang menghadirkan siang yang terang dengan rahmat-Nya, dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Salam dan shalawat semoga senantiasa tercurah atas junjungan Rasulullah Muhammad SAW, sebagai uswatun hasanah yang telah memberi cahaya kesucian dan kebenaran hakiki kepada seluruh umatnya dan semoga keselamatan dilimpahkan kepada seluruh keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Tidaklah mudah untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa sejak penyusunan proposal sampai skripsi ini rampung, banyak hambatan, rintangan, dan halangan. Namun berkat bantuan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak semua ini dapat teratasi dengan baik. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan pada skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaannya.

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini, bukanlah akhir dari sebuah karya, melainkan awal dari semuanya, awal dari sebuah perjuangan hidup, dan awal dari sebuah do'a yang selalu menyertainya. Amin.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada orang tuaku tercinta Ayahanda Nurdin Dg. Rani dan Ibunda Saerah, S. Ag., M. Si. serta saudari tercinta Nurhidayatul Jannah, S. Keb, serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan segala doa, cinta, perhatian, kasih sayang, dorongan baik moril maupun materiil, dengan penuh keikhlasan serta doa restunya yang selalu mengiringi penulis dalam setiap langkah selama menempuh pendidikan juga berbagai pihak yang senantiasa memberikan dorongan, bantuan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis. Semoga Allah SWT, senantias melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Muhajir, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Drs. H. Nurdin, M.Pd. selaku penasehat akademik yang telah membimbing selama perkuliahan.

5. Bapak Drs. H. Nasrun Hasan, M.Pd. selaku pembimbing 1, atas segala bimbingan, arahan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan semoga segala bimbingan dan arahan yang diberikan menjadi amal ibadah disisi Allah SWT.
6. Ibu Dra. Jumiati Nur, M.Pd. selaku pembimbing 2, atas segala bimbingan, arahan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan semoga segala bimbingan dan arahan yang diberikan menjadi amal ibadah disisi Allah SWT.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menyalurkan ilmunya secara ikhlas dalam mendidik penulis sebagai bekal di masa yang akan datang.
8. Bapak Zulkifli Saidah, S.Pd.,M.Pd. selaku kepala sekolah SMA Negeri 4 Gowa, yang bersedia menerima penulis untuk melaksanakan penelitian.
9. Ibu Hanziah, S.Pd. selaku guru PPKn SMA Negeri 4 Gowa yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian ini.
10. Jayanti Patricia Z, S.E. yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Teman seperjuangan seluruh angkatan 2014 terkhusus kelas 2014 A yang selalu setia berbagi canda dan tawa serta motivasi dan kebersamaannya selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Kebersamaan ini akan menjadi sebuah cerita indah yang tidak akan bisa terlupakan.
12. Staf LP3M, Staf Perpustakaan dan Staf Administrasi atas segala bantuannya.

13. Adik-adik siswa XI Ipa 3 SMA Negeri 4 Gowa atas kerjasama yang baik dalam pelaksanaan penelitian.

14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak sempat disebutkan satu persatu semoga menjadi ibadah dan mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya penulis berharap semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT, dengan pahala yang berlipat ganda . semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Rabbal Alamin.

Billahi fii sabililil haq , Fastabiqul khaerat, Wassalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Makassar , Juni 2019

Ahmad Shalahuddin



DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| SURAT PERJANJIAN | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR BAGAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| 1. Manfaat Teoritis | 5 |
| 2. Manfaat Praktis | 6 |
| E. Batasan Penelitian | 6 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Landasan Teori | 7 |
| 1. Tata Tertib Sekolah | 7 |
| 2. Peran dan Fungsi Guru PPKn | 15 |
| 3. Sanksi dan Pembinaan | 21 |
| B. Kerangka Pikir | 27 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian | 29 |
| B. Lokasi Penelitian | 29 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 29 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| E. Analisis Data | 31 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

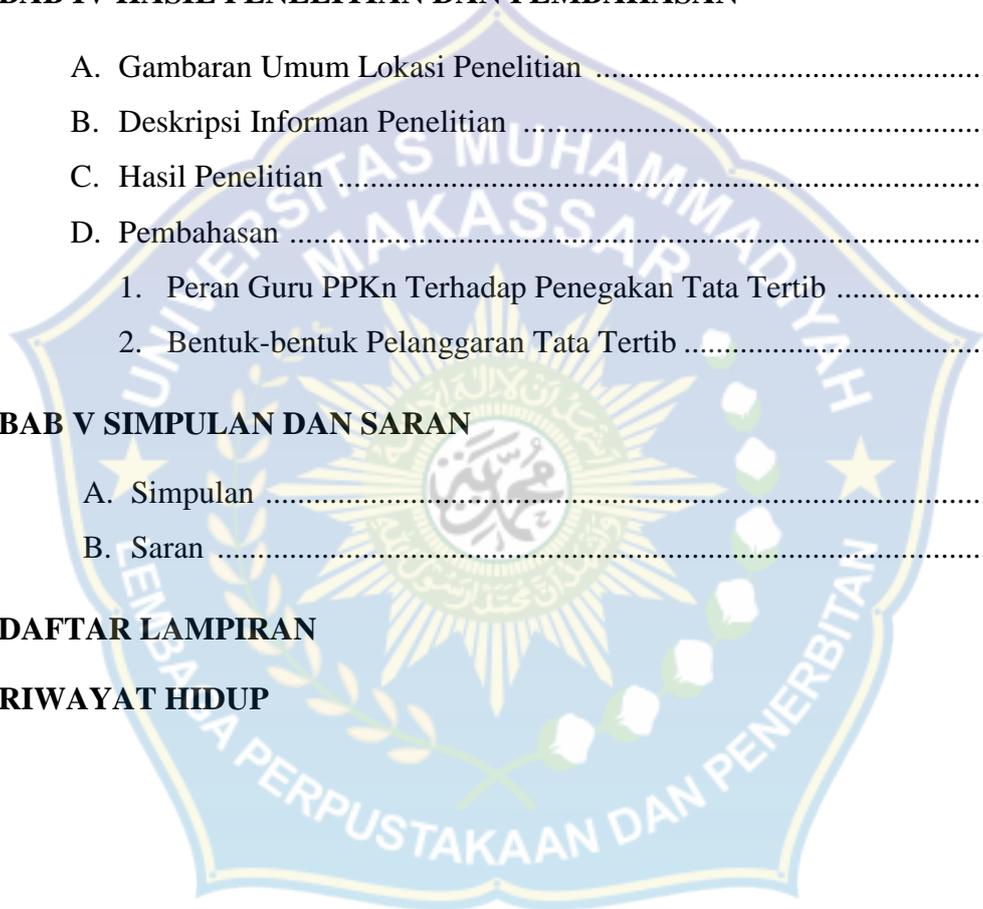
| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 33 |
| B. Deskripsi Informan Penelitian | 38 |
| C. Hasil Penelitian | 38 |
| D. Pembahasan | 46 |
| 1. Peran Guru PPKn Terhadap Penegakan Tata Tertib | 46 |
| 2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Tata Tertib | 50 |

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 52 |
| B. Saran | 52 |

DAFTAR LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 4.1 Sarana dan Prasaran SMA Negeri 4 Gowa | 34 |
| 4.2 Deskripsi Informan Penelitian | 38 |
| 4.3 Hasil Wawancara Peneliti dengan Siswa | 43 |
| 4.4 Bentuk-bentuk Pelanggaran Tata Tertib | 44 |



DAFTAR BAGAN

| Bagan | Halaman |
|---|---------|
| 2.1 Bagan Kerangka Pikir | 28 |
| 4.1 Bagan Struktur Organisasi SMA Negeri 4 Gowa | 33 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat, pendidikan juga merupakan sarana demi meningkatkan kualitas dan nilai hidup masyarakat, dengan membentuk karakter baik sikap, perilaku dan pola pikir individu, mencegah terjadinya pembodohan yaitu tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan banyak pihak seperti melakukan tindak kejahatan.

Menurut Hasbullah (2017) “Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan”. Sisi terpenting dari pendidikan adalah menciptakan anak-anak bangsa yang cerdas, tidak muda terpengaruh dan memiliki moral sehingga dapat membantu dalam upaya pembangunan negara dengan memberikan pengetahuan agar mampu menciptakan individu yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas dan ilmiah, yaitu pandangan yang terstruktur dan berdasarkan fakta.

Dalam dunia pendidikan dikenal dengan adanya jalur pendidikan yang dilalui peserta didik untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan serta potensi diri dalam suatu proses pendidikan, jalur pendidikan itu sendiri terdiri dari pendidikan in formal yaitu pendidikan di dasar yang di dapatkan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar, pendidikan formal yaitu pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dimana jenis pendidikan formal ini memiliki tingkatan dan jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan

tinggi serta pendidikan non formal yaitu pendidikan yang didapatkan diluar pendidikan formal seperti pendidikan usia dini atau dengan mengikuti berbagai kursus.

Sekolah adalah jalur pendidikan formal yang merupakan wadah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta sekolah juga menjadi tempat interaksi antara pendidik dan peserta didik maupun antara para peserta didik, sekolah sebagai sistem pendidikan bagi masyarakat diharapkan dapat mengembangkan dan mendidik peserta didik agar mampu menjadi manusia seutuhnya yang bermartabat. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menampung peserta didik dan membina siswa agar memiliki kemampuan kecerdasan dan keterampilan, sekolah sebagai sistem pendidikan perlu mengembangkan potensi-potensi diri siswa dengan baik di bidang pribadi-sosial dan agama, karir maupun belajar (akademik).

Salah satu upaya sekolah untuk membantu siswa agar belajar dengan baik adalah dengan menanamkan sikap disiplin dan demi kelancaran proses belajar mengajar di sekolah maka dibuatlah peraturan-peraturan di dalam lingkup sekolah yang dikenal sebagai tata tertib sekolah yaitu seperangkat ketentuan yang secara keolompok atau organisasi yang mengikat setiap komponen sekolah, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, maupun perangkat sekolah yang lain agar visi dan misi sekolah dapat tercapai, selain bertujuan untuk ketertiban tata tertib juga berguna untuk mengatur tata perilaku siswa agar sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan, agama dan norma hukum yang berlaku.

Walaupun di sekolah masing-masing telah memiliki tata tertib masih banyak saja siswa yang tidak disiplin dan melakukan pelanggaran, Menurut Suardi dan

Daryanto (2017), “Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat”. Sikap tidak patuh siswa terhadap tata tertib sekolah biasanya dikarenakan rendahnya pemahaman siswa terhadap tata tertib itu sendiri, atau dikarenakan latar belakang siswa yang beragam baik itu latar belakang ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan orang tua.

Guru merupakan mediator untuk menyalurkan pendidikan kepada peserta didik di sekolah, guru sebagai pendidik merupakan peran yang berkaitan dengan tugas memberi bantuan serta dorongan, tugas pengawasan dan pembinaan serta tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan peserta didik agar patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma-norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.

Guru PPKn berperan penting dalam membentuk moral dan mengajarkan norma-norma kepada anak didiknya, karena pada dasarnya mata pelajaran yang diajarkan yaitu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang memfokuskan, membekali dan membentuk siswa menjadi warga negara yang berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis dan inovatif. Guru PPKn juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membina peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah dengan cara yang edukatif.

Seperti kebanyakan kasus pelanggaran-pelanggaran tata tertib disekolah sama halnya yang terjadi pada aktivitas belajar mengajar yang berlangsung di SMA Negeri 4 Gowa yang menunjukkan bahwa terdapat sebagian siswa secara sengaja atau tidak sengaja melakukan atau bertindak tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam tata tertib sekolah, masih banyak siswa yang berperilaku menyimpang karena tidak dapat mengendalikan dorongan dirinya

yang selalu berubah-ubah. Pelanggaran terhadap kedisiplinan di sekolah yang sering terjadi meliputi jenis pelanggaran terlambat masuk sekolah, bolos saat jam pelajaran, berpakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan, merokok dan banyak pelanggaran lainnya, semua pelanggaran tata tertib yang dilakukan masing-masing memiliki sanksi yang berbeda-beda.

Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang diberikan dari sekolah karena melakukan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang tidak sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah. Pemberian sanksi di SMA Negeri 4 Gowa dengan cara peringatan bertahap berupa surat peringatan dan juga pemberian poin pelanggaran dimana setiap pelanggaran memiliki bobot poinnya masing-masing. Setiap pelanggaran yang dilakukan pertama-tama akan mendapat pembinaan dan arahan yang bersifat edukatif atau mendidik oleh guru yang bersangkutan, jika pelanggaran yang dilakukan siswa cukup berat maka akan diberikan surat peringatan atau surat panggilan kepada orang tua siswa.

Adanya pemberian sanksi kepada siswa diharapkan akan memberikan efek jera agar tidak melakukan atau mengulangi pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah agar dapat membentuk siswa-siswa yang disiplin sehingga perilaku-perilaku menyimpang siswa dan pelanggaran-pelanggaran moral yang sering terjadi dapat ditekan seminimal mungkin.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Peran Guru PPKn Terhadap Penegakan Tata Tertib Sekolah Pada Siswa SMA Negeri 4 Gowa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran guru PPKn dalam penegakan tata tertib siswa SMA Negeri 4 Gowa?
2. Apa sajakah pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 4 Gowa?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui peran guru PPKn dalam penegakan tata tertib siswa SMA Negeri 4 Gowa.
2. Untuk mengetahui apa saja pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 4 Gowa.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis mengenai bagaimana peran guru PPKn dalam menangani perilaku menyimpang siswa di sekolah.
- b. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan konseptual serta referensi dan informasi bagi penulis selanjutnya sebagai pengembangan penulisan dengan judul sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi bagi para tenaga pendidik serta penulis sendiri sebagai calon pendidik dalam upaya membina peserta didiknya agar menjadi siswa-siswa yang disiplin.
- b. Sebagai bahan masukan khususnya guru PPKn SMA Negeri 4 Gowa dalam menangani peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada jenis pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa serta tindakan-tindakan yang diambil guru PPKn SMA Negeri 4 Gowa dalam menangani dan mendisiplinkan peserta didiknya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tata Tertib Sekolah

a. Konsep dan Definisi Tata Tertib Sekolah

Tujuan sekolah untuk mencerdaskan peserta didiknya dapat diwujudkan melalui program-program yang telah di buat oleh masyarakat sekolah, dalam usahanya untuk membuat suasana belajar mengajar yang kondusif yaitu suasana belajar yang tenang, disiplin dan tertib maka sekolah membuat tata tertib sekolah. Tata tertib merupakan suatu rangkaian aturan dan ketentuan yang telah disusun dan diatur dalam suatu kesatuan yang mengikat seluruh komponen sekolah baik murid, guru dan kepala sekolah dalam rangka mencapai tujuan sekolah.

Tata tertib merupakan hal yang diatur oleh adat istiadat yang dianggap sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun, kebiasaan dalam masyarakat sering disamakan dengan adat istiadat. Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama, yang dianggap sebagai aturan hidup. Norma seperti norma-norma agama, kesopanan, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum sebagai aturan yang mengikat.

Tata tertib terangkai dari dua kata yaitu tata dan tertib menurut kamus besar bahasa Indonesia tata berarti aturan, kaidah dan susunan serta tertib yang berarti disiplin atau peraturan-peraturan yang harus ditaati

atau dilaksanakan. Dalam penelitiannya Musfidah (2014) menjelaskan bahwa “tata tertib sekolah merupakan suatu produk dari sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan agar semua kegiatan yang ada dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan”.

“Secara umum tata tertib sekolah dapat diartikan sebagai ikatan atau aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah tempat berlansungnya proses belajar mengajar” (Irwansa, 2016). Tata tertib tidak hanya merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi tetapi tata tertib sekolah hal yang sangat penting dalam membantu program sekolah, hal terpenting dari adanya tata tertib sekolah ialah suatu penunjang yang dapat membantu kesadaran dan ketaatan terhadap rasa tanggung jawab yang merupakan inti dari pembangunan kepriadian anak.

★ Anggoro (2012) menyimpulkan bahwa “tata tertib adalah suatu atauran-aturan atau kaidah yang di buat berdasarkan nilai-nilai yang dianut di sekolah dan masyarakat dan harus di patuhi oleh seluruh komponen yang ada di dalamnya.

Dari beberapa pengertian tentang tata tertib diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tata tertib merupakan suatu kumpulan aturan-aturan tertulis yang bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat sekolah agar proses belajar mengajar yang di lakukan dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

b. Tujuan dan Fungsi Tata Tertib Sekolah

Secara umum dibuatnya tata tertib sekolah mempunyai tujuan yang sama pada setiap sekolah yaitu agar seluruh masyarakat sekolah mengetahui apa tugas, hak dan kewajibannya agar dapat melaksanakan fungsi masing-masing dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar.

Musfidah (2014), membagi tujuan tata tertib sekolah menjadi dua bagian, adapun secara rinci tujuan tersebut yaitu:

- 1) Bagi peserta didik
 - a) Menginsafkan anak akan hal-hal yang teratur, baik dan buruk.
 - b) Mendorong berbuat yang tertib dan baik serta meninggalkan yang baik/buruk.
 - c) Membiasakan akan ketertiban pada hal-hal yang baik.
 - d) Tidak menunda pekerjaan bila dapat dikerjaklan sekarang.
 - e) Menghargai waktu seektifitas mungkin.
- 2) Bagi sekolah
 - a) Ketenangan sekolah dapat tercipta.
 - b) Proses belajar-mengajar dapat berjalan lancar.
 - c) Terciptanya hubungan baik antara guru dengan siswa dan antara siswa yang satu dengan yang lain.
 - d) Terciptanya apa yang menjadi tujuan dari sekolah tersebut.

Selain fungsi diatas tata tertib sekolah juga berperan sebagai pedoman perilaku belajar siswa dalam berhubungan dengan semua lingkungan di sekolah, tata tertib sekolah berfungsi untuk menyesuaikan anggota masyarakat sekolah dan untuk mengatur serta mengendalikan perilaku siswa di sekolah agar tercipta keadaan yang tenang, tertib dan terkendali sehingga proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan sekolah.

Sedangkan fungsi dari tata tertib sekolah menurut Hurlock dalam Anggoro (2012), adalah wujud dari peraturan sekolah yang mempunyai dua fungsi yang sangat penting dalam membantu peserta didik menjadi pribadi yang bermoral:

- 1) Fungsi yang pertama adalah bahwa Fungsi yang pertama adalah bahwa peraturan mempunyai nilai pendidikan sebab peraturan memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui anggota kelompok tersebut, misalnya anak belajar dari peraturan tentang memberi dan menerima dan mendapat bantuan dalam fungsi sekolahnya bahwa menyerahkan tugas yang dibuat sendiri merupakan suatu metode yang dapat diterima sekolah untuk menilai prestasinya.
- 2) Fungsi yang kedua adalah peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Bila peraturan keluarga mengatur bahwa tidak seorang anakpun boleh mengambil mainan milik saudaranya tanpa sepengetahuan dan ijin sipemilik, maka anak akan segera ditegur bahwa hal ini dianggap perilaku yang tidak baik.

Tujuan peraturan tata tertib sekolah dibuat dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dan tujuan tata tertib sekolah dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Dimana siswa dapat mengetahui tugas, hak dan kewajibannya.
- 2) Dimana siswa dapat mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan kreatifitas meningkat serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan dirinya.
- 3) Dimana siswa dapat mengetahui dan melaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah.

c. Pelanggaran Tata Tertib

Melihat fakta yang kerap terjadi masih banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, kesadaran peserta didik menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran tata tertib sekolah, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat sekolah terikat akan tata tertib sekolah itu sendiri tapi kenyataan yang kerap kita temui siswa acuh akan pentingnya menaati tata

tertib sekolah. Karena pada dasarnya, tata tertib sekolah di buat agar tujuan sekolah dapat tercapai.

Dari beberapa uraian mengenai tata tertib yang telah di jelaskan sebelumnya dapat di artikan bahwa pelanggaran tata tertib merupakan tindakan tidak patuh terhadap peraturan yang telah di tetapkan yang bertujuan untuk melancarkan proses belajar mengajar di sekolah yang harusnya dipatuhi seluruh siswa di sekolah.

Bentuk-bentuk pelanggaran menurut Soeparwoto dalam Anggoro (2012), yang dilakukan sisw disekolah meliputi senagai berikut:

- 1) Membolos.
- 2) Terlambat.
- 3) Menyontek.
- 4) Berkelahi.
- 5) Mencuri.
- 6) Merokok.
- 7) Membawa buku atau sejenisnya yang mengandung unsur pornografi.
- 8) Berpakaian tidak sesuai aturan.
- 9) Minum minuman keras.
- 10) Menkomsumsi obat-obatan terlarang.

Taupan (2015), membedakan bentuk pelanggaran menjadi dua menurut jenisnya, yaitu:

- 1) Pelanggaran primer

Pelanggaran primer adalah pelanggaran yang dilakukan seseorang hanya bersifat sementara, tidak berulang kali.

2) Pelanggaran sekunder

Pelanggaran sekunder adalah pelanggaran yang nyata dan kerap kali dilakukan (berulang-ulang melakukan hal yang sama), sehingga mengganggu orang lain.

Musfidah (2014), juga menguraikan bentuk-bentuk dan tingkat pelanggaran secara kualitatif dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan yaitu:

- 1) Pelanggaran ringan, yaitu bentuk kenakalan remaja yang tidak terlalu merugikan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Apabila merugikan, maka sangat kecil sekali kerugian yang di timbulkan.
- 2) Pelanggaran sedang, yaitu kenakalan yang mulai terasa akibatnya kepada diri sendiri maupun orang lain akan tetapi belum mengandung unsur pidana.
- 3) Pelanggaran berat, yaitu kenakalan remaja yang terasa merugikan baik kepada diri sendiri, orang lain maupun masyarakat dimana perbuatan tersebut telah mengarah ke ranah hukum.

Tata tertib mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kedisiplinan, karena kedisiplinan merupakan salah satu faktor penting didalam penegakan peraturan dan tata tertib sekolah. Tingkat kesadaran akan kedisiplinan yang dimiliki oleh siswa sangat berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran tata tertib sekolah.

Dalam penelitiannya Musfidah (2014), juga menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi siswa adalah timbul karena adanya tiga faktor yaitu:

a) Faktor keluarga

Keluarga adalah lembaga pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi pribadi anak dan juga keluarga memberikan pengaruh menentukan pembekalan watak kepribadian

b) Faktor lingkungan sekolah

Sekolah merupakan pendidikan yang kedua setelah keluarga bagi anak-anak. Permasalahan yang disebabkan oleh faktor sekolah adalah:

- 1) Adanya guru yang kurang simpatik terhadap siswanya.
- 2) Fasilitas pendidikan yang kurang memadai.
- 3) Hubungan antaraguru dan siswa yang kurang harmonis.
- 4) Cara mengajar guru yang membosankan.

c) Faktor lingkungan masyarakat

Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Masyarakat dapat pengaruh terhadap perilaku anak, membentuk kebiasaan pengetahuan anak. Anak remaja yang sebagai anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari keadaan dan lingkungannya baik langsung maupun tidak langsung, dan lingkungan sekitar tidak selalu baik dan menguntungkan bagi pendidikan dan perkembangan anak.

Hal-hal yang dapat menyebabkan remaja menjadi nakal dan melanggar peraturan diantaranya:

- 1) Persaingan dan perekonomian.
- 2) Kurangnya sarana dan pemanfaatan waktu dengan kegiatan yang positif bagi para remaja.
- 3) Pengaruh bagi teman sebaya.
- 4) Pengaruh media masa.
- 5) Kurangnya kegiatan atau pendidikan keagamaan dalam masyarakat.

2. Peran dan Fungsi Guru PPKn

Guru mempunyai tanggung jawab yang besar, selain memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan sebagai bekal peserta didik untuk menghadapi masa depannya, guru juga bertanggung jawab mendidik yang berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta mengembangkan keterampilan.

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua setelah keluarga, seorang guru harus mampu menjadi tauladan bagi siswanya, sehingga dapat menjadi pedoman dan contoh oleh siswanya dalam bersikap, berperilaku dan berdisiplin menurut peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Mendidik adalah menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap materi yang disampaikan kepada anak. Penanaman nilai-nilai akan lebih efektif apabila dibarengi dengan tauladan yang baik dari gurunya yang akan dijadikan contoh bagi anak. Dengan demikian diharapkan siswa dapat menghayati nilai-nilai tersebut dan menjadikannya bagian dari kehidupan siswa itu sendiri. Jadi peran

dan tugas guru PPKn bukan hanya menjejali anak dengan semua ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan menjadikan siswa tahu segala hal. Akan tetapi guru juga harus dapat berperan sebagai pentransfer nilai-nilai (*transfer of values*).

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang dapat membentuk kepribadian siswa dengan mengajarkan moral dan norma-norma agar dapat menghasilkan peserta didik yang berkarakter. Dengan demikian guru PPKn harus banyak berusaha agar peserta didiknya memiliki sikap yang baik, oleh karna itu guru PPKn harus dapat berfungsi sebagai panutan moral, sikap dan memberikan dorongan motivasi kearah yang lebih baik dan positif.

Peran guru PPKn sebagai tenaga pendidik merupakan peran yang berkaitan dengan tugas memberi dorongan, tugas pengawasan dan pembinaan serata tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar menjadi patuh terhadap aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Guru PPKn sebagai penaggun jawab pendisiplinan anak harus mengontrol sikap peserta didik agar tingkah lakunya tidak menyimpang pada norma-norma yang ada.

Dalam penelitiannya Ferdinata (2016) mengatakan:

Seorang guru PPKn diharapkan bisa jadi manajer atau pengelola kelas yang profesional guna terciptanya suasana kelas dan lingkungan sekolah yang kondusif yang memungkinkan untuk suasana belajar yang menggairahkan dan terbentuknya siwa-siswi yang memiliki disiplin tinggi.

a. Guru PPKn sebagai Pembina Kedisiplinan

Melalui pembinaan, guru PPKn berarti selalu memberikan pengawasan terhadap siswa, dan selalu memperhatikan siswa, mengenalkan siswa terhadap peraturan yang berlaku, dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa.

Menurut Furqon (2010:47) penegakan kedisiplinan antara lain dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Peningkatan motivasi Motivasi merupakan latar belakang yang menggerakkan atau mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, 47 motivasi merupakan suatu landasan psikologis (kejiwaan) yang sangat penting bagi setiap orang dalam melaksanakan sesuatu aktivitas.
2. Pendidikan dan latihan Pendidikan dan latihan merupakan suatu proses yang di dalamnya ada beberapa aturan atau prosedur yang harus diikuti oleh peserta. Misalnya, gerakan-gerakan latihan, yang bagaimanapun juga sifatnya, akan menempa orang untuk mematuhi atau mentatai ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan, mengikuti cara-cara atau teknik, mendidik orang untuk membiasakan hidup dalam kelompok, menumuhkan rasa setia kawan, kerja sama yang erat, dan sebagainya.
3. Kepemimpinan Kualitas kepemimpinan dari seorang pemimpin, guru, atau orangtua terhadap anggota, murid, ataupun anaknya turut menentukan berhasil atau tidaknya dalam pembinaan disiplin. Karena pemimpin merupakan panutan. Maka faktor keteladanannya juga sangat berpengaruh dalam pembinaan disiplin bagi yang dipimpinnya.
4. Penegakan aturan Penegakan disiplin biasanya dikaitkan penerapan aturan. Idealnya dalam menegakkan aturan hendaknya diarahkan pada “Takut pada aturan bukan takut pada orang”. Orang melakukan sesuatu karena taat pada aturan bukan karena taat pada orang yang memerintah. Jika hal ini tumbuh menjadi suatu kesadaran maka menciptakan kondisi yang nyaman dan aman.

5. Penerapan reward and punishment Reward and punishment atau penghargaan dan hukuman merupakan dua kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika penerapannya secara terpisah maka tidak akan berjalan efektif, terutama dalam rangka menegakkan disiplin.

b. Guru PPKn Sebagai Motivator

Guru PPKn sebagai motivator dapat membantu siswa untuk mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik, sehingga siswa memiliki pribadi dan tingkah laku yang positif, serta disiplin yang baik seperti yang telah di kemukakan oleh Surya (2003: 97) yang menyatakan bahwa: Pada dasarnya motivasi mengandung tiga pokok yaitu:

1. menggerakkan, berarti menimbulkan kekuatan pada individu siswa, memimpin seseorang untuk bertindak dengan tertentu. Misalnya kekuatan dalam hal ingatan, respon-respon efektif dan kecenderungan kesenangan.
2. mengarahkan, berarti menyalurkan tingkah laku. Dengan demikian siswa menyediakan suatu orientasi tujuan atau tingkah laku individu diarahkan kepada sesuatu.
3. menopang tingkah laku siswa, berarti lingkungan sekitar siswa berada harus menguatkan (*reinforce*) intensitas atau arah dorongan-dorongan dan kekuatan individu.

Motivasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan disiplin siswa, karena dengan cara motivasi ini guru PPKn dapat menumbuhkan kembali semangat dalam diri siswa untuk mengejar impian siswa, karena dengan ingatnya siswa terhadap impian yang ingin dicapainya akan membuat siswa kembali

bersemangat dan berkonsentrasi untuk membenahi dirinya demi menggapai impiannya tersebut.

c. Guru PPKn Sebagai Teladan

Guru merupakan orang yang perilakunya akan ditiru oleh siswa, dan guru merupakan contoh bagi seluruh siswa, oleh karena itulah seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik untuk ditirukan terhadap siswa. Melalui teladan ini guru dapat memberikan contoh perilaku.

Keteladanan hendaknya diartikan dalam arti luas yaitu berbagai ucapan, sikap, dan perilaku yang melekat pada guru. Keteladanan dalam pendidikan merupakan pendekatan atau metode yang sangat berpengaruh dalam mempersiapkan dan membentuk serta mengembangkan potensi siswa. Guru PPKn harus memiliki sikap dan kepribadian yang utuh agar dijadikan tokoh panutan dalam seluruh segi kehidupannya. Guru PPKn harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya jika guru mengatakan kepada siswa, bahwa siswa harus menegakkan keadilan, siswa harus selalu hidup gotong royong, siswa harus disiplin dan sebagainya adalah suatu ajaran yang baik. Akan tetapi akan berakibat fatal jika sekali saja guru berbohong dan diketahui siswa, maka pribadi guru tersebut akan hilang kewibawaannya dan dapat berakibat fatal terhadap kegiatan belajar mengajar selanjutnya, karena siswa tidak akan percaya lagi dengan perkataan guru tersebut. Oleh karena itu Guru PPKn sebagai pembentuk perilaku siswa yang berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dituntut untuk memiliki kesamaan sikap dan perkataannya, sehingga dirinya dapat dijadikan suri tauladan bagi siswanya.

Christine, (2009: 107) menyebutkan bahwa memerlukan beberapa kiat antara lain :

1. Jangan sesekali membolos/mangkir mengajar
2. Jika tidak hadir, beri tugas kepada siswa
3. Buat aturan sanksi dan jalankan secara konsisten
4. Cegah kesalahan siswa sedapat mungkin
5. Maafkan kesalahan siswa
6. Jangan sering terlambat mengajar
7. Buat mereka agar taat kepada anda
8. Jangan pillih kasih
9. Jangan bosan menasehati kedisiplinan
10. Jang an enggan menegur kesalahan siswa
11. Tanyakan peserta yang tidak hadir secara terbuka
12. Jangan terlalu merasa berhutang budi terhadap siswa

Dengan begitu siswa akan meniru dan berusaha untuk taat terhadap peraturan yang ada. Melalui cara ini usaha mendisiplinkan siswa yang dilakukan oleh sekolah dan guru PPKn sangat efektif, karena siswa akan terbiasa dengan kebiasaan, dan prilaku baik yang di contohkan oleh guru PPKn.

3. Sanksi dan Pembinaan

a. Bentuk-bentuk sanksi

Sanksi berasal dari kata latin sanctum yang berarti penegasan (bevestiging atau bekrachtiging) yang dapat bersifat positif dalam bentuk anugrah atau hadiah dan dapat bersifat negatif dalam bentuk hukuman. Menurut Suartha (2015) mengartikan “sanksi berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggar normanya”.

Menurut Purwanto (2005) “hukuman (punishment) ialah penderitaan yang diberikan atau di timbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sejawatnya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan”.

Berdasarkan definisi diatas dapat dilihat bahwa sanksi atau hukuman tidak semata-mata diberikan, tetapi karna adanya suatu pelanggaran. Seperti yang disimpulkan Arianti (2014) “tujuan hukuman dalam pendidikan ialah memperbaiki tabiat dan tingkah laku anak kearah kebaikan dan anak akan menyesali serta menyadari perbuatan salah yang telah dilakukannya”.

Hukuman atau sanksi dianggap sebagai alat pendidikan yang istimewa kedudukannya karena hukuman membuat anak didik merasa jera sehingga anak akan memilih mematuhi peraturan dari pada melanggar peraturan tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran yang di berikan biasanya bermacam-macam tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Dalam bukunya Suwardi dan Daryanto (2017), siswa/siswi yang melanggar/tidak mematuhi aturan sekolah dan tata tertib siswa dikenakan sanksi-hukuman-tindakan sebagai berikut:

- a. Peringatan lisan.
- b. Peringatan tertulis.
- c. Pemberitahuan-peringatan kepada orang tua.
- d. Panggilan orang tua.
- e. Hukuman fisik yang terukur dan mendidik.
- f. Penugasan mendidik dan tidak merugikan siswa.
- g. Penggantian material tertentu sesuai pelanggaran yang dilakukan.
- h. Pemotongan rambut, pengecatan hitam sepatu, penyitaan barang-barang yang tidak sesuai aturan dan lain-lain yang bersifat mendidik.
- i. Penundaan belajar (skorsing).
- j. Pengembalian kepada orang tua (dikeluarkan dari sekolah).

b. Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling dalam institusi pendidikan mengetengahkan studi kelayakan sebagai fase yang penting untuk dilakukan, hal ini mengacu pada semua alasan mengapa diperlukan suatu program dan kebutuhan siswa apa yang dapat dipenuhi melalui program tersebut sekaligus ditentukan garis-garis kebijakan umum yang dapat diambil pada institusi pendidikan.

Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling disekolah karna adanya kesadaran akan perlunya sistem pengajaran dan pelayanan pendidikan yang berpusat pada kebutuhan dan karakteristik anak, kesadaran akan penuhnya penerapan demokrasi dalam pendidikan, kesadaran akan permasalahan individu

dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang, kesadaran akan persoalan yang akan dilalui dalam kehidupan mereka.

Bimbingan merupakan terjemahan dari *guidance* yang berasal dari kata *guide* yang secara luas bermakna mengarahkan, memandu, mengelola/menyampaikan, mendorong, serta pemberi pertimbangan yang bersifat demokratis. Bimbingan merupakan salah satu bidang dan program dari pendidikan, dan program ini ditujukan untuk membantu mengoptimalkan perkembangan siswa (Hikmawati, 2014).

Sedangkan menurut Badarudin (2011), bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus, dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bahasa latin istilah konseling disebut *consilium* yang berarti “dengan” atau “bersama”. Menurut Badarudin (2011), konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan dalam hubungan tatap muka antara seorang ahli (yaitu orang yang telah mengikuti pendidikan khusus dan terlatih secara baik dalam bidang bimbingan dan konseling) dan seorang individu yang sedang mengalami suatu masalah atau kesulitannya sendiri.

Dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat dilihat bahwa bimbingan dan konseling merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling terikat, seperti halnya yang telah dikemukakan oleh Hikmawati (2014), bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara

perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar dan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku.

c. Tujuan Bimbingan dan Konseling

Misi dasar dan tujuan utama pendidikan sekolah adalah untuk membelajarkan siswa, oleh sebab itu bimbingan dan konseling merupakan bagian dari proses pendidikan maka seluruh aktivitas bimbingan harus diarahkan pada pembelajaran siswa.

Menurut Dharma (2008), tujuan bimbingan dan konseling disekolah ialah agar peserta didik dapat:

- a) Mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin.
- b) Mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri.
- c) Mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya, yang meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, pekerjaan, sosial ekonomi dan kebudayaan.
- d) Mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah.
- e) Mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan.
- f) Memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak sekolah.

d. Fungsi Bimbingan dan Konseling

Hikmawati (2014) menguraikan fungsi dari bimbingan dan konseling di sekolah di antaranya:

- b) Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama). Berdasarkan pemahaman ini, konseling mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal, dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif.
- c) Fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan terhadap konseli tentang cara menghindari diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Adapun tehnik yang digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi dan bimbingan kelompok. Beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada para konseli dalam rangka mencegah terjadinya tingka laku yang tidak diharapkan, diantaranya: bahayanya minuman keras, merokok, peyalahgunaan obat-obatan, drop out, dan pergaulan bebas (free sex).
- d) Fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personel sekolah/madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork berkolaborasi atau bekerja sama

merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Tehnik bimbingan yang dapat digunakan disini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat (brain storming), home room, dan karyawisata.

- e) Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karier. Tehnik yang dapat digunakan adalah konseling, dan remedial teaching.
- f) Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurukuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karier atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan cirir-ciri kepribadian lainnya. dalam melaksanakan fungsi ini konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya didalam maupun diluar lembaga pendidikan.
- g) Fungsi Adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah/ madrasah dan staf, konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan dan kebutuhan konseli. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, pembimbing/konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah/madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran maupun penyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli.

- h) Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungan secara dinamis dan konstruksi.
- i) Fungsi Perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membant konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan dan bertindak (berkehendak). Konselor melakukan intervensi (memberikan perlakuan) terhadap konseli supaya memiliki pola berpikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat menghantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif.
- j) Fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan pada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli.
- k) Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif dan fakultatif (pilihan) sesuai dengan minat konseli.

B. Kerangka Pikir

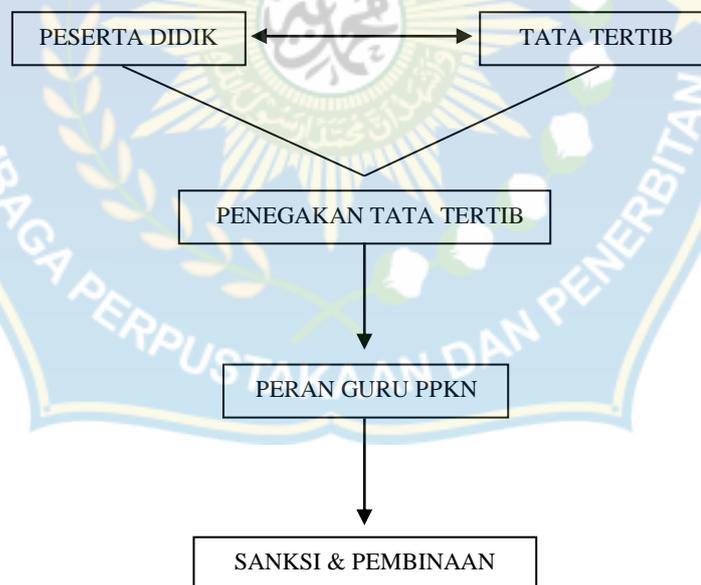
Salah satu perangkat inti dari sebuah lembaga pendidikan ialah peserta didik dan guru, tanpa keduanya proses belajar mengajar tidak akan berlangsung. sudah menjadi tujuan sekolah , membuat suasana di lingkungan sekolah tertib dan

disiplin, demi mewujudkannya sekolah membuat aturan-aturan yaitu tata tertib sekolah yang harus dipatuhi segenap perangkat sekolah.

Tata tertib mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kedisiplinan karena kedisiplinan merupakan salah satu faktor penting di dalam penegakan peraturan sekolah. Tingkat kesadaran akan kedisiplinan yang dimiliki oleh siswa sangat berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran tata tertib sekolah.

Sudah tugas guru untuk membimbing peserta didiknya menjadi pribadi yang bermoral, berhubungan dengan itu peran guru PPKn sangat diharapkan dapat membantu dalam penegakan tata tertib sekolah dengan mengarahkan serta membina peserta didiknya kearah yang lebih baik agar sekali lagi tujuan sekolah dapat tercapai.

Bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Bagan 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk deskriptif dari hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara mengenai peran guru PPKn dalam penegakan tata tertib sekolah sesuai dengan indikator-indikator peranan guru PPKn. Data yang ingin diperoleh yaitu data primer dari hasil wawancara dan data sekunder berupa data pendukung yang dapat diperoleh dari pihak sekolah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu SMA di daerah Tinggimoncong, yaitu SMA Negeri 4 Gowa yang beralamat di jalan pendidikan Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Adapun waktu pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 10 April s/d 25 Mei 2019.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dari hasil wawancara pada beberapa informan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi di sekolah atau sumber media lainnya.

2. Sumber Data

- a) Sumber data primer diperoleh dari beberapa informasi yaitu:
 - 1) Wawancara dengan guru PPKn SMA Negeri 4 Gowa.
 - 2) Wawancara dengan siswa yang berjumlah 6 orang.
 - 3) Observasi siswa kelas XI IPA 3 yang berjumlah 34 orang.
- b) Sumber data sekunder yaitu:
 - 1) Dokumen-dokumen yang ada di sekolah.
 - 2) Tulisan-tulisan berkenaan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Wawancara

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

Wawancara dalam penelitian ini untuk memperoleh keterangan tentang bagaimana peran guru PPKn dalam penegakan tata tertib sekolah di SMA Negeri 4 kabupaten Gowa sesuai dengan indikator peranan guru PPKn.

2. Kuesioner

Teknik angket atau kuesioner merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/ Pernyataan kepada

responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.

3. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mengamati objek penelitian berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, kondisi atau suasana tertentu.

4. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah langkah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang berupa data, akta, surat atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang didapatkan dari sekolah, sehingga data tersebut dapat dijadikan sebagai narasumber bagi peneliti selain dari wawancara secara langsung dan observasi.

E. Analisis Data

Dalam analisis data peneliti menggunakan analisis data kualitatif dari buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Kaelan, M.S. yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan secara terperinci dengan cara dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema atau polanya. Metode reduksi data bertujuan untuk memilah-milah atau mengelompokkan hasil temuan di sekolah yang kemudian ditulis secara terperinci.

2. Penyajian Data

Data yang bertumpuk-tumpuk melalui penyajian data akan dapat terorganisasikan dengan baik dan mudah untuk dipahami. Maka dalam

penyajian data peneliti membuat berbagai macam pengklasifikasian sistematis agar mudah menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dimulai sejak penelitian dilaksanakan dan senantiasa diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah seiring berjalannya proses penelitian karena kemungkinan akan bertambahnya bukti-bukti hasil dari temuan di lapangan. Proses inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Penarikan kesimpulan menggunakan metode analisis induktif, yaitu berangkat dari data, kemudian teori yang diperoleh dari buku dianalisis berdasarkan data yang didapatkan.



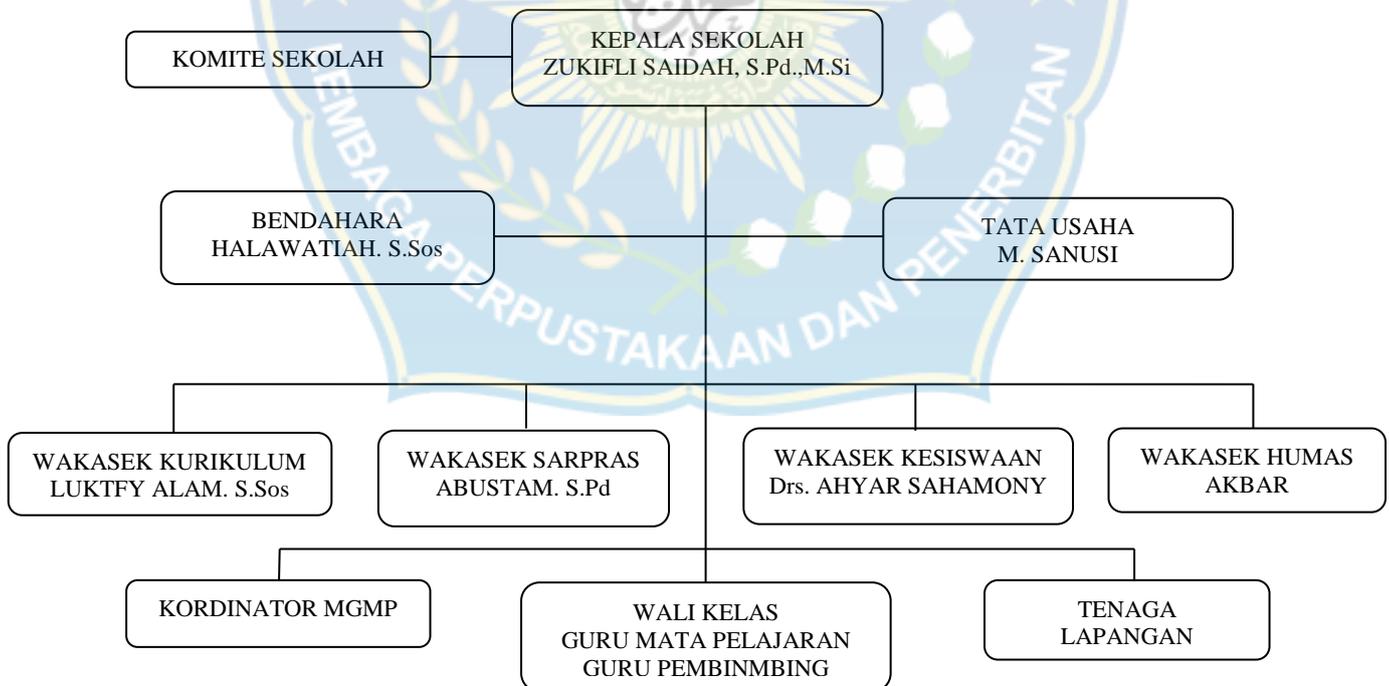
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

SMA Negeri 4 Gowa yang dulunya di kenal dengan nama SMA Negeri 1 Tinggi Moncong merupakan sekolah menengah atas negeri dibawah naungan pemerintah kabupaten Gowa yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa yang didirikan pada tanggal 23 Maret 1991. Sekolah ini dipimpin oleh kepala sekolah bernama bapak Zulkifli Saidah, S.Pd.,M.Si dengan dibantu oleh tenaga pengajar sebanyak 27 orang yang terdiri dari guru honorer sebanyak 8 orang dan PNS sebanyak 19 orang.

Bagan 4.1 Struktur Organisasi SMA Negeri 4 Gowa



1. Keadaan Siswa

Jumlah siswa secara keseluruhan 607 siswa yang terbagi dalam 19 kelas, kelas X berjumlah 196 siswa, kelas XI berjumlah 208 siswa dan kelas XII berjumlah 193 siswa.

2. Sarana dan Prasarana

Jumlah ruang yang ada di SMA Negeri 4 Gowa

Tabel 4.1 Sarana dan Prasaran SMA Negeri 4 Gowa

| No | Sarana dan Prasarana | jumlah | Keterangan |
|-----|-----------------------|--------|----------------|
| 1. | Ruang Kepala Sekolah | 1 | Baik |
| 2. | Ruang Guru | 1 | Baik |
| 3. | Ruang BP/BK | 1 | Baik |
| 4. | Mushollah | 1 | Baik |
| 5. | Rumah Dinas Guru | 8 | Baik |
| 6. | Rumah Penjaga Sekolah | 1 | Baik |
| 7. | Ruang Osis | 1 | Baik |
| 8. | Ruang Aula/Serba Guna | 1 | Baik |
| 9. | Ruang Tata Usaha | 1 | Baik |
| 10. | Ruang UKS | 1 | Baik |
| 11. | Ruang Pramuka | 1 | Baik |
| 12. | Sanitasi | 4 | Baik |
| 13. | Laboratorium | 4 | Baik |
| 14. | Ruang Kelas Belajar | 19 | 9 Rusak Ringan |
| 15. | Perpustakaan | 1 | Baik |

F. Tugas Perangkat Sekolah

a. Tugas Kepala Sekolah:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
- 2) Membina kesiswaan.
- 3) Melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- 4) Menyelenggarakan administrasi sekolah.
- 5) Merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana.
- 6) Melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan / masyarakat

b. Tugas wakil Kepala Sekolah: Wakil Kepala Sekolah membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan- kegiatan sbb:

- 1) Penyusunan rencana, pembuatan program kegiatan dan program pelaksanaan
- 2) Pengorganisasian
- 3) Pengarahan
- 4) Ketenagakerjaan
- 5) Pengkoordinasian
- 6) Pengawasan
- 7) Penilaian
- 8) Identifikasi dan pengumpulan data
- 9) Pengembangan keunggulan

10) Penyusunan laporan

c. Tugas Guru Mata Pelajaran:

- 1) Membuat Perangkat Pembelajaran
- 2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran
- 3) Melaksanakan kegiatan Penilaian Proses Belajar, Ulangan Harian, Ulangan Umum, Ujian Akhir
- 4) Melaksanakan analisis hasil ulangan harian e. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan f. Mengisi daftar nilai siswa
- 5) Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan) kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar
- 6) Membuat alat pelajaran / alat peraga
- 7) Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni
- 8) Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum
- 9) Melaksanakan tugas tertentu di sekolah
- 10) Mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya
- 11) Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar
- 12) Mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran.
- 13) Mengatur keberhasilan ruang kelas dan pratikum
- 14) Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan perangkatnya

d. Tugas Wali Kelas

- 1) Pengelolaan kelas

- 2) Penyelenggaraan administrasi kelas meliputi : Denah tempat duduk siswa, Papan absensi siswa, Daftar pelajaran kelas, Daftar piket kelas, Buku absensi siswa, Buku kegiatan pembelajaran/buku kelas, Tata tertib siswa, pembuatan statistik bulanan siswa.
 - 3) Pengisian daftar kumpulan nilai (legger).
 - 4) Pembuatan catatan khusus tentang siswa.
 - 5) Pencatatan mutasi siswa.
 - 6) Pengisian buku laporan penilaian hasil belajar.
 - 7) Pembagian buku laporan hasil belajar
- e. Tugas Tata Usaha:
- 1) Penyusunan program kerja tata usaha sekolah.
 - 2) Peng elolaan keuangan sekolah.
 - 3) Pengurus administrasi ketenagaan dan siswa.
 - 4) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah.
 - 5) Penyusunan administrasi perlengkapan.
 - 6) Penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah.
 - 7) Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K.
 - 8) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketata usahaan secara berkala.

B. Deskripsi Informan Penelitian

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dan informan, deskripsi informan selanjutnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2 Deskripsi Informan Penelitian

| No | Nama | Status |
|----|------------------------|--|
| 1. | Hamziah, S.Pd | Guru PPKn jurusan IPA dan IPS kelas 1, 2 dan 3 SMA Negeri 4 Gowa |
| 2. | Nur Faizih Aspar | Siswa kelas X IPA 1 |
| 3. | Tria Ayu Ningsi | Siswa kelas X IPA 3 |
| 4. | Dela Safira | Siswa kelas X IPA 2 |
| 5. | Nurfadillah Rahmadhani | Siswa kelas XI IPA 3 |
| 6. | Iqbal Syah | Siswa kelas XI IPA 2 |
| 7. | Indi Sya'ban Nurul | Siswa kelas XI IPS 2 |

C. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi serta wawancara langsung peneliti dengan guru PPKn dan siswa SMA Negeri 4 Gowa, mengenai pentingnya menjelaskan isi tata tertib kepada siswa menurut Ibu Hamziah, "tata tertib sangat penting disampaikan dan diterapkan pada siswa agar terciptanya suasana proses belajar mengajar yang nyaman, karna tata tertib merupakan seperangkat peraturan yang mengikat setiap komponen yang ada di sekolah baik guru kepala sekolah dan terlebih untuk siswa maupun untuk komponen-komponen lainnya atau perangkat sekolah lainnya agar tercapai tujuan yang diinginkan oleh sekolah".

Pernyataan ini menjelaskan bahwa untuk mencapai ketertiban dan kenyamanan di sekolah maka setiap komponen terutam guru PPKn senantiasa harus memberikan arahan mengenai perlunya tata tertib untuk dilaksanakan khususnya oleh para siswa.

Demikian pula pernyataan guru PPKn dalam menyikapi jika ada siswa yang melakukan pelanggaran.pertama-tama tindakan yang perlu dilakukan adalah dengan cara menumbuhkan kesadaran diri pada siswa tentang pentingnya mematuhi tata tertib

sekolah yang telah ditetapkan dengan memberi teguran secara langsung sebelum menjatuhkan hukuman kepada siswa karna biasanya memberikan suatu teguran terlebih dahulu merupakan langkah yang lebih efektif dibandingkan jika langsung memberikan hukuman. Kemudian tindakan selanjutnya ialah memberikan bimbingan dan arahan konseling dengan cara terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada siswa agar guru dapat menggali apa yang menyebabkan siswa tersebut menjadi tidak patuh atau selalu melanggar tata tertib, dengan pendekatan yang dilakukan guru maka seorang siswa akan lebih terbuka dan lebih leluasa menceritakan apa yang melatar belakangi siswa melakukan pelanggaran. Langkah atau tindakan selanjutnya barulah pemberian sanksi atau hukuman jika siswa tersebut terus mengulangi pelanggaran agar siswa tersebut sadar akan kesalahan yang dilakukan dan bahkan jerah untuk kemudian melakukan suatu pelanggaran lagi. Tindakan atau upaya guru yang terakhir ialah dengan selalu melakukan pengawasan kepada siswa agar siswa dapat patuh akan tata tertib. (Hamziah. 26 juni 2019).

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa sikap atau tindakan guru PPKn dalam menangani siswa yang melakukan pelanggaran adalah dengan melakukan tahapan-tahapan yang dimana guru PPKn tidak secara langsung memeberikan suatu hukuman atau sanksi melainkan terlebih dahulu memberikan suatu teguran dan arahan. Guru PPKn juga senantiasa melakukan pengawasan terhadap siswa-siswanya.

Ibu Hamziah juga menjelaskan tentang teguran dan pemberian sanksi apa saja yang ia berikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran, yang pertama memberikan teguran lisan kemudian barulah pemberian sanksi berupa suatu tindakan seperti menyapu atau mengpel lantai kelas, membersihkan WC, mencukur rambut, lari keliling lapangan membuat surat pernyataan sampai memberikan pengurangan pada

nilai siswa, jika sanksi yang diberikan tidak mampu juga mengubah perilaku siswa (melanggar tata tertib) maka siswa tersebut akan diserahkan kepada pihak BK (bimbingan dan konseling) untuk kemudian di tindak lanjuti dengan didampingi orang tuanya.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pemberian sanksi yang di berikan oleh guru PPKn terhadap siswa yang melakukan pelanggaran dilihat dari bentuk pelanggaran yang dilakukan siswa jika pelanggaran yang dilakukan siswa masi terbilang ringan atau sedang maka guru PPKn masi bisa memberikan suatu sanksi yang berupa teguran atau tindakan, dan apabila pelanggaran yang dilakukang oleh siswa sudah terbilang pelanggaran berat maka guru PPKn meyerahkan kepada guru BP untuk tindakan lebih lanjut.

Dengan adanya pemberian sanksi berdasarkan penjelasan yang di uraikan sebelumnya guru PPKn juga menjelaskan pengaruh perilaku siswa setelah pemberian teguran atau sanksi. Menurut Ibu Hamziah kebanyakan siswa berubah perilakunya setelah mendapatkan hukuman, akan tetapi setelah pemeberian sanksi guru harusnya melakukan pendekatan emosional sehingga siswa tidak merasa di pojokkan dan merasa canggung terhadap guru sehingga memotivasi diri siswa untuk menjadi lebih baik dan selanjutnya tidak melakukan pelanggaran lagi.

Dari pernyataan diatas dapat di lihat bahwa guru PPKn tidak berhenti setelah pemberian sanksi kepada siswanya, melainkan guru PPKN memberiakn suatu dorongan motivasi kepada siswa agar siswa tidak merasa terkucilkan setelah di berikan sanksi oleh guru PPKN.

Dengan kata lain guru PPKn tidak hanya semata-mata memberikan teguran dan sanksi sebagai langkah agar siswa selalu menaati tata tertib sekolah tetapi guru PPKn

juga memotivasi siswanya. Ibu Hamziah mengatakan bahwa salah satu cara untuk memotivasi seorang siswa adalah dengan melihat potensi dalam diri siswa sehingga guru mampu mengarahkan siswa untuk fokus dalam mengembangkan potensi yang dimiliki siswa dengan demikian siswa tidak akan lagi melakukan suatu pelanggaran karena siswa akan fokus terhadap impian yang ingin dicapai sehingga siswa kembali bersemangat dan berkonsentrasi untuk membenahi dirinya.

Berdasarkan keterangan di atas guru PPKn mempunyai kiat sendiri untuk memotivasi siswa-siswanya dengan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki siswa dan senantiasa memberikan dukungan dan dorongan yang dapat menumbuhkan kembali semangat dalam diri siswa.

Dalam upayanya menegakkan tata tertib sekolah guru PPKn tidak jarang menemui kendala-kendala, dalam pernyataannya Ibu Hamziah mengatakan dalam mendisiplinkan siswa, sulitnya mengontrol dan mengendalikan emosi siswa yang tidak stabil menjadi salah satu kendala utama guru PPKn dalam menegakkan tata tertib sekolah. Karakter siswa yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh lingkungan keluarga serta kehidupan sosialnya sehingga menjadi sulit untuk dapat berkomunikasi dengan bebas kepada siswa karena bersifat tertutup terhadap orang lain.

Dalam pernyataan di atas dapat dilihat bahwa masalah yang dihadapi oleh guru PPKn dalam mendisiplinkan siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor dimana faktor dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial siswa sehingga mempengaruhi emosional siswa dan senantiasa tertutup kepada orang lain jika mendapatkan masalah.

Dari kendala-kendala yang dihadapi oleh guru PPKn adapun upaya yang dilakukan dalam menangani hal tersebut menurut Ibu Hamziah guru PPKn seharusnya

mampu memberikan perhatian lebih serta bekerja sama dengan orang tua siswa dan komite sekolah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa, adapun upaya lain yang dapat dilakukan guru yaitu pertama-tama dengan menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah seperti melakukan penyuluhan, memberikan pengertian dan pembinaan, yang kedua memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran secara konsisten tetapi dengan memperhatikan jenis sanksi yang akan diberikan kepada siswa. Ketiga memberikan contoh sikap teladan dengan perkataan dan perbuatan yang dapat menjadi contoh bagi siswa. Dan yang terakhir memberikan kepercayaan kepada siswa serta pujian bila siswa melakukan hal-hal yang positif

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa upaya yang guru PPKn lakukan dalam memhadapi masalah dalam mendisiplinkan siswa yaitu dengan melakukan suatu pendekatan kepada siswa dan mencari tahu apa yang melatar belakangi siswa melakukan pelanggaran, menanamkan sikap akan pentingnya tata tertib, memberikan sanksi secara konsisten berdasarkan tingkatan pelanggaran yang dilakukan siswa, memberikan suatu contoh tauladan yang patut ditiru, serta memberikan kepercayaan dan memuji siswa yang melakukan perilaku baik.

Selain mewawancarai Ibu Hamziah selaku guru PPKn SMA Negeri 4 Gowa peneliti juga melakukan wawancara serta membagikan kuesioner kepada 6 orang siswa dari beberapa perwakilan kelas yang memiliki presentase kehadiran diatas 98% yang berarti siswa dapat memberikan informasi yang akurat sesuai indikator wawancara yang digunakan.

Tabel 4.3 Hasil Wawancara Peneliti dengan Siswa

| No. | Pertanyaan | Ya | Tidak |
|-----|--|----|-------|
| 1. | Saya pernah membaca tata tertib sekolah | 5 | 1 |
| 2. | Saya pernah melakukan pelanggaran | 6 | 0 |
| 3. | Guru PPkn menegur siswa yang melanggar | 6 | 0 |
| 4. | Guru PPkn memberi sanksi/menghukum siswa yang melanggar | 4 | 2 |
| 5. | Guru PPkn pernah tidak hadir pada jam mengajar | 6 | 0 |
| 6. | Guru PPkn pernah terlambat saat jam mengajar | 6 | 0 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada poin pertama dari enam siswa hanya satu yang menjawab tidak dan lima diantaranya menjawab iya, artinya sebagian besar siswa telah mengetahui isi dari tata tertib sekolah.

Pada poin yang kedua, keenam siswa menjawab pernah melakukan suatu pelanggaran tata tertib. Poin yang ketiga semua siswa menjawab iya, artinya guru PPkn memberikan perhatian atau pengawasan terhadap siswa yang melanggar. Pada poin keempat dari keenam siswa ada empat siswa yang menjawab iya dan dua lainnya menjawab tidak, yang artinya guru PPkn tidak selalu memberikan sanksi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Kemudian poin yang keelima semua siswa menjawab iya, artinya bahwa guru PPkn tidak selalu hadir pada saat jam mengajar dan pada poin terakhir dapat dilihat bahwa guru PPkn sering tidak tepat waktu untuk memulai jam pelajaran.

Selain melakukan pengamatan tentang peran guru PPKn dalam penegakan tata tertib sekolah, peneliti juga mengamati tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam lingkup SMA Negeri 4 Gowa, dan hasil penelitian yang diperoleh dengan observasi dan pembagian kuesioner yang mengambil siswa kelas XI Ipa 3 sebanyak 34 siswa sebagai sampel dan pengelompokan jumlah berdasarkan bentuk pelanggaran dapat dilihat dari tabel dibawah.

Tabel 4.4 Bentuk-bentuk Pelanggaran Tata Tertib

| Bentuk Pelanggaran | Banyak Siswa |
|---|---------------------|
| Terlambat datang ke kelas pada jam mata pelajaran | 22 |
| Tidak memakai seragam yang telah ditentukan | 12 |
| Tidak mengerjakan tugas sekolah | 8 |
| Meninggalkan pelajaran tanpa alasan yang jelas | 8 |
| Melompat pagar atau jendela di gedung sekolah | 5 |

Dari hasil yang didapatkan oleh peneliti mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan siswa, ada beberapa pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh siswa yaitu terlambat, bolos saat jam mata pelajaran lompat pagar tidak mengerjakan tugas sekolah dan tidak menengenenakan antribut lengkap. Peneliti juga pernah mendapati siswa yang melakukan suatu pelanggaran lebih dari satu kali yaitu mendapatkan siswa yang sama melakukan pelanggaran yang sama.

Selain membagikan kuesioner pada siswa peneliti juga melakukan observasi langsung di lingkungan sekolah dan mendapati temuan antara lain senagai berikut:

1. Guru PPKn menegur siswa yang berkeliaran diluar kelas saat jam mata pelajaran berlangsung
2. Guru PPKn memberi sanksi kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas pada jam mata pelajarnya dengan cara menghukum siswa berdiri di depan kelas sampai jam mata pelajaran selesai
3. Adanya siswa yang berada diluar sekolah saat jam mata pelajaran masih berlangsung
4. Peneliti mendapati siswa yang terlambat saat jam pelajaran telah dimulai dan tidak mengenakan atribut lengkap

D. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil penelitian atau analisis data yang dilakukan maka akan diuraikan pembahasan hasil penelitian.

1. Peran guru PPKn pada Penegakan Tata Tertib
 - a. Peran Guru PPKn sebagai Pembina Kedisiplinan

Munurut hasil analisis data yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan guru PPKn dapat dilihat bahwa informan dapat dilihat bahwa guru PPKn sangat banyak berkontribusi dalam penegakan tata tertib sekolah sehubungan dengan perannya sebagai Pembina kedisiplinan dapat dilihat dari pernyataannya yang menunjukkan bahwa guru PPKn melakukan penyampaian tata tertib kepada siswanya, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa melalui pembinaan guru PPKn berarti selalu memberikan pengawasa terhadap siswa, selalu memperhatikan siswa, mengenalkan siswa pada peraturan yang berlaku serta mengembangkan

potensi yang dimiliki oleh siswa. Pernyataan lain yang mendukung teori ini juga disebutkan oleh guru PPKn bahwa dari beberapa tahapan tindakan yang dilakukan guru dalam menangani siswa yang melakukan pelanggaran adalah dengan selalu melakukan pengawasan kepada siswa.

Dalam pernyataan lain guru PPKn juga menyampaikan bahwa melakukan bimbingan dan arahan konseling untuk siswa, selain itu pada pernyataan selanjutnya guru PPKn juga menyampaikan bahwa ia melakukan penyuluhan tata tertib kepada siswanya dimana pernyataan-pernyataan tersebut juga sangat mendukung teori Furqon (2010) bahwa pendidikan dan latihan merupakan satu proses yang didalamnya ada beberapa aturan atau prosedur yang harus diikuti oleh pesertanya.

Menurut Furqon (2010) dalam teori penegakan kedisiplinannya peningkatan motivasi merupakan latar belakang yang menggerakkan atau mendorong siswa dalam melakukan sesuatu, teori ini didukung dari pernyataan informan yang menyampaikan bahwa guru PPKn memberikan suatu dorongan motivasi kepada siswa agar siswa lebih fokus terhadap impian yang ingin dicapai dengan demikian siswa mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran. Pernyataan lain dari informan bahwa upaya guru PPKn menghadapi kendala-kendala dalam penegakan tata tertib adalah dengan memberikan contoh sikap teladan dengan perkataan dan perbuatan yang mampu menjadi contoh bagi siswa, pernyataan ini juga sejalan dengan teori Furqon dalam penegakan kedisiplinan yang menjelaskan bahwa kepemimpinan dari seorang guru terhadap muridnya turut menentukan berhasil atau tidaknya dalam pembinaan disiplin karna pemimpin merupakan panutan

maka faktor keteladanan juga sangat berpengaruh dalam pembinaan disiplin bagi yang dipimpinnya.

Selain dari pada itu pernyataan lain dari hasil wawancara dengan guru PPKn bahwa menumbuhkan kesadaran diri pada siswa tentang pentingnya tata tertib adalah dengan cara memberikan sanksi atau hukuman yang efektif, pernyataan ini berkenaan dengan teori Furqon (2010) mengenai penegakan kedisiplinan salah satunya dengan cara menerapkan *reward and punishment* atau penghargaan dan hukuman yang merupakan kesatuan yang efektif, dalam hasil penelitian telah diuraikan pernyataan guru PPKN bahwa memberikan kepercayaan serta pujian kepada siswa merupakan salah satu upaya dalam menangani kendala mendisiplinkan siswa yang dimana pernyataan tersebut menjadi salah satu unsur teori yaitu pemberian *reward*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa guru PPKn senantiasa melakukan pembinaan dilihat dari terpenuhinya kriteria peran guru PPKn sebagai Pembina kedisiplinan bagi siswa di SMA Negeri 4 Gowa, karena dari hasil wawancara pernyataan-pernyataan yang disampaikan guru PPKn sejalan dengan semua teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya mengenai perannya sebagai Pembina kedisiplinan.

b. Peran Guru PPKn sebagai Motivator

Peranan guru PPKn sebagai motivator tidak hanya sebatas memotivasi siswa dalam mengajarkan materi pembelajaran tetapi juga sebagai pendidik dan pelatih siswa dalam pembentukan dan menumbuhkan kedisiplinan siswa di sekolah. Upaya guru PPKn sebagai motivator dapat dilihat dari guru yang melakukan suatu pendekatan secara emosional yaitu merupakan suatu cara yang

dilakukan oleh guru untuk memberikan suatu pemahaman tentang pentingnya disiplin siswa terhadap tata tertib sehingga siswa mampu untuk mengimplementasikan berupa sikap atau tindakan disiplin dilingkungan sekolah maupun lingkungan sosialnya.

Selain itu langkah-langkah yang dilakukan oleh guru untuk mendisiplinkan siswa dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap hasil wawancara guru PPKn adalah dengan cara memotivasi siswa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa, sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Surya (2003) dimana dalam teorinya ada tiga indikator perang guru PPKn sebagai motivator dimana yang pertama adalah menggerakkan, kedua mengarahkan, dan yang ketiga menopang tiggah laku siswa. Dari langkah-langkah yang dilakukan guru PPKn sejalan dengan teori Surya yaitu mengarahkan siswa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, dengan memberikan kepercayaan kepada siswa dan memberikan pujian terhadap potensi-potensi yang dimiliki siswa tersebut.

Guru PPKn sebagai motivator, di mana guru PPKn harus mampu memberikan dorongan kepada semua siswa untuk bersikap disiplin dan berperilaku positif, guru PPKn juga harus bisa mengubah siswa agar selalu disiplin dalam semua hal. Dengan adanya guru PPKn menjadi motivator maka diharapkan siswa akan terbiasa patuh dan mempertinggi daya kendali dirinya akan dapat lebih mamacu dan tahan lama dibandingkan dengan sikap disiplin siswa yang timbul karena adanya pengawasan dari orang lain.

c. Peran Guru PPKn sebagai Tauladan

Peran guru PPKn sebagai tauladan, yaitu tidak hanya dari sikap, melainkan guru PPKn harus mampu menjadi contoh bagi siswa-siswanya dimana guru memperlihatkan sikap dan perbuatan disiplin yang baik kepada siswanya. Dari hasil analisis yang peneliti temukan tentang bagaimana seorang guru PPKn menjadi tauladan bagi siswanya dapat dikatakan bahwa masih kurang memenuhi syarat, dimana dalam hasil wawancara singkat yang dilakukan peneliti dengan siswa, guru PPKn seringkali mampir mengajar dan terlambat masuk ke kelas saat jam pelajaran dimulai, dari hasil yang ditemukan bahwa guru PPKn tidak memenuhi perannya sebagai tauladan dimana dalam teori yang dikemukakan oleh Cristine (2009) kriteria peran guru PPKn sebagai tauladan diantaranya menyebutkan bahwa point pertama menyebutkan bahwa jangan sesekali membolos/mangkir mengajar dan pada point yang lainnya menyebutkan bahwa jangan sering kali terlambat mengajar.

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Tata Tertib Siswa

Dari hasil analisis data tentang bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib sekolah kurangnya pemahaman siswa SMA Negeri 4 Gowa Kelas XI Ipa 3 tentang peraturan tata tertib sekolah menjadi faktor utama terjadinya suatu pelanggaran. Berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Soeparwoto dalam Anggoro (2012) tentang bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa sebagian besar pelanggaran tersebut seringkali di lakukan oleh siswa SMA Negeri Gowa Kelas XI Ipa 3 yang dimana pelanggaran tersebut seperti terlambat, tidak mengerjakan tugas, tidak mengenakan atribut sekolah, bolos jam mata pelajaran sampai lompat pagar.

Dari uraian diatas maka bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan siswa tergolong pelanggaran sekunder. Pelanggaran sekunder merupakan suatu pelanggaran yang nyata yang kerap kali dilakukan (berulang-ulang melakukan hal yang sama) dan mengganggu orang lain disekitarnya. Berdasarkan dari tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dapat digolongkan kedalam pelanggaran sedang, yaitu pelanggaran yang dilakukan siswa itu mulai berdampak pada diri siswa itu sendiri dan orang lain akan tetapi belum mengandung unsur pidana.

Dengan demikian, dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang melatar belakangi pelanggaran-pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa SMA Negeri 4 Gowa Kelas XI Ipa 3 tersebut. Dimana kesadaran siswa masih kurang baik, dimana dari hasil observasi masih banyak siswa yang melakukan suatu pelanggaran tata tertib yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran yang selama ini dilakukan oleh siswa adalah pelanggaran-pelanggaran yang tergolong pelanggaran sedang.

Tingkat kesadaran siswa ini dipengaruhi oleh latar belakang siswa yang berbeda-beda. Latar belakang siswa dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat tempat para siswa bersosialisasi sehari-hari akan berpengaruh terhadap prilaku berdisiplin siswa di sekolah. Berdasarkan latar belakang siswa tersebut maka sekolah berupaya untuk meningkatkan kualitas disiplin siswa dengan tujuan agar setelah bersekolah di SMA Negeri 4 Gowa siswa menjadi warga negara yang baik dan memiliki kualitas disiplin yang tinggi untuk membangun dan memajukan bangsa karena peningkatan kedisiplinan dalam sekolah akan menjadi dasar untuk siswa agar siswa memiliki sikap disiplin nasional.

Melihat dari banyaknya pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa peran guru sangatlah penting terutama guru PPKn dalam membentuk moral dan disiplin siswa. Melihat peran guru PPKn yang dikemukakan oleh Ferdinata (2016), mengatakan bahwa guru PPKn diharapkan mampu untuk mengelola kelas yang professional guna terciptanya suasana kelas dan lingkungan sekolah yang kondusif yang memungkinkan suasana belajar yang menggairahkan dan terbentuknya siswa-siswi yang memiliki disiplin tinggi.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran guru PPKn dalam penegakan tata tertib siswa mencakup tiga indikator yang pertama guru PPKn berperan sebagai Pembina kedisiplinan, dari hasil analisis menunjukkan bahwa guru PPKn telah memenuhi perannya sebagai Pembina kedisiplinan dan perannya sebagai motivator, sedangkan guru PPKn sebagai tauladan bagi siswanya masi belum sepenuhnya terpeuhi atau belum maksimal
2. Dari hasil kuesioner yang diperoleh dari 34 siswa mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan oleh siswa ada lima bentuk pelanggaran yaitu terlambat datang ke kelas pada jam mata pelajaran, tidak memakai seragam yang telah ditentukan, tidak mengerjakan tugas sekolah, meninggalkan pelajaran tanpa alasan yang jelas dan melompat pagar atau jendela di gedung sekolah

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Kepada pihak sekolah diharapkan dapat mempertimbangkan hasil-hasil penelitian dalam mengambil suatu kebijakan.
2. Diharapkan kepada para guru khususnya bidang studi PPKn supaya dapat memberikan suatu pemahaman dan pembinaan terhadap siswa tentang pentingnya sikap disiplin dan taat pada peraturan tata tertib sekolah.

3. Kepada para peneliti di bidang pendidikan khususnya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan agar mampu melakukan penelitian yang lebih lanjut tentang peran guru PPKn terhadap penegakan tata tertib sekolah.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Dwi Nugroho. 2012. *Pelanggaran tata Tertib Sekolah dan Faktor-Faktor Penyebabnya pada Siswa SMA Negeri 1 Geyer Kabupaten Grobongan Tahun Ajar 2011/2012*, (Online), (<http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2562/>), diakses 9 Agustus 2018).
- Ferdinata. 2016. *Peran Guru PPKn dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di Sekolah (Studi kasus di SMA Pasundan 7 Bandung)*, (Online), (<http://repository.unpas.ac.id/13139/>), diakses 6 Agustus 2018)
- Hidayatullah, Furqon. 2010. *Pendidikan Karakter: Membangu Peradaban Bangsa*. Surakarta: UNS Pres & Yuma Pestaka.
- Hasbullah. 2017. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Irwansa, A. 2016. *Analisis Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah pada Siswa di SMK Negeri 1 Makassar*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Prof. Dr. H. Kaelan, M.S. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma 2012.
- Musfidah, Nurlailia. 2014. *Pelaksanaan Pembinaan Akhlak dalam Menanggulangi Pelanggaran Tata Tertib Sekolah di Kelas 8 SMP Wchid Hasyim 2 Surabaya*, (Online), (<http://digilib.uinsby.ac.id/>), diakses 23 Juli 2018).
- Rumiati dan Andre Paulus Saleky. 2018. *Peran Guru Mata Pelajaran PPKn. Citizenship jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Sarwono, S Wirawan. 2016. *Psikologi Remaja*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. 2015. *Metode penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suardi dan Daryanto. 2017. *Manajemen Peserta Didik*. Yogyakarta: Penerbit Media
- Suartha, MI. 2015. *Hukum dan Sanksi Adat: Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Surya Muhammad. 2003. *Psikologi Konseling* Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Taupan, Muhamad. 2015. *Bimbingan Pemantapan IPS-Geografi dan IPS-Sosiologi*. Bandung: CV. Yrama Widya.



RIWAYAT HIDUP



Ahmad Shalahuddin. Dilahirkan di Bonto te'ne Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa pada tanggal 11 April 1997, dari pasangan Ayahanda Nurdin Dg. Rani dan Ibunda Saera. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2003 di MI Bonto te'ne Kabupaten Gowa dan tamat pada tahun 2008, tamat MTs Bonto te'ne tahun 2011, dan tamat SMA Negeri 1 Tinggimoncong tahun 2014. Pada tahun yang sama (2014), penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai tahun 2019.



DAFTAR LAMPIRAN

- A. TATA TERTIB SEKOLAH**
- B. INSTRUMEN PENELITIAN**
- C. PERSURATAN**
- D. DOKUMENTASI**



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 4 GOWA

Jalan Pendidikan Malino Kec. Tinggimoncong, Telepon (0417) 2123 Gowa (92174)

TATA TERTIB GURU

1. Setiap guru mempunyai tugas pokok mendidik murid-murid menjadi seorang yang bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berintelektual yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur, cerdas dan trampil, berkepribadian yang kuat, memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air, untuk menjadi manusia pembangunan yang berguna bagi nusa dan bangsa.
2. Setiap guru wajib melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur, setia dan menyadari akan tugas guru sebagai tugas pengabdian bagi nusa dan bangsa.
3. Setiap guru wajib mentaati segala peraturan/keputusan dan pengumuman sekolah, hasil rapat sekolah, serta patuh pada Pimpinan.
4. Setiap guru dilarang memberikan ajaran-ajaran di luar pelajaran yang telah ditentukan, atau bertentangan dengan idiologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
5. Setiap guru tidak berpolitik praktis, dan harus bersikap netral pada setiap Pemilu, Pilupres dan Pilukada
6. Setiap guru tidak diperkenankan memberi pelajaran tambahan kepada murid-murid dengan memungut biaya, kecuali ada persetujuan/kesepakatan dari Kepala Sekolah atau langsung diatur oleh sekolah.
7. Setiap guru diharapkan tidak merokok di ruangan kelas atau memakan makanan sewaktu bertugas kecuali di kantor guru.
8. Setiap guru tidak bergunjing di lingkungan sekolah, setiap pendapat /opini harus diungkapkan sesuai jalur yang benar dengan tetap menjaga privasi masing-masing guru.
9. Setiap guru tidak diperkenankan meninggalkan ruangan kelas sewaktu melaksanakan tugas mengajar di kelas.
10. Setiap guru wajib menegur atau mengambil tindakan tegas yang sifatnya mendidik sedini mungkin bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah jika perlu diserahkan kepada Wali Kelas/BP atau Wakil Kepala Sekolah ur kesiswaan / penegak kedisiplinan
11. Setiap guru wajib memeriksa kesiapan/kelengkapan siswa saat belajar di kelas, meliputi buku-buku, alat-alat tulis, kelengkapan pakaian (atribut sekolah, label

- nama, dan lambang OSIS), sepatu, kaos kaki, serta kebersihan/kerapian rambut dan kerapian siswa.
12. Setiap guru adalah pengajar dan juga pendidik yang harus menjadi teladan yang baik bagi murid dan masyarakat dalam hal berpakaian, bersolek, bertutur kata, tingkah laku dan sopan santun yang baik.
 13. Setiap guru harus menjaga nama baik Korps guru-guru serta wajib memelihara suasana kerjasama yang baik berdasarkan azas kekeluargaan.
 14. Setiap guru mempunyai tugas profesional yaitu mendidik, mengajar dan melatih dengan memperhatikan :
 - a. Berperilaku sesuai etika guru
 - b. Mengadakan persiapan mengajar
 - c. Bertugas dan berada di sekolah selama jadwal hari kerja
 - d. Mengadakan evaluasi pelajaran secara teratur
 - e. Mengadakan remedial dan pengayaan
 - f. Membina hubungan baik antar sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat
 - g. Mengisi administrasi kelas berupa :
 - Absensi siswa
 - Catatan kelas (batas pelajaran, sumber pelajaran, data kehadiran siswa, paraf dan tanda
 15. tangan guru setiap pertukaran les pelajaran)
 - Daftar nilai bulanan, nilai tugas dan Ulangan Umum
 - Perhitungan prosentase pencapaian target kurikulum per Semester
 - Membuat interpretasi terhadap nilai-nilai siswa
 - Laporan bukti fisik pelaksanaan ujian ulangan dan PR siswa
 16. Setiap guru wajib mengikuti upacara nasional yang diadakan di sekolah dan turut membantu mengawasi murid dalam penyelenggaraan acara tersebut.
 17. Setiap guru wajib bertanggung jawab menjaga dan mengawasi murid-murid dalam hal :
 - a. Murid-murid dalam hal kelakuannya, membimbing dan menasehatinya
 - b. Kebersihan dan kerapian kelas dan seluruh kompleks sekolah
 - c. Murid-murid dalam setiap aktivitas sekolah
 - d. Alat-alat milik sekolah dan memeliharanya
 18. Setiap guru wajib melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sekolah sehubungan dengan kepentingan tercapainya tujuan instruksional atau tujuan pendidikan nasional pada umumnya.
 19. Setiap guru wajib mengenakan pakaian seragam hijau (Hansip) pada hari Senin, dan Pakaian Keki (Dinas Pendidikan/Pemda Dompu) Selasa sampai Rabu, hari

- kamis pakaian PSH / seragam sekolah (biru tua), hari Jumat berpakaian batik atau Olahraga, sedangkan hari Sabtu pakaian tenunan daerah .
20. Setiap guru pada setiap hari senin pagi wajib mengikuti upacara penaikan bendera serta turut membantu menertibkan murid dalam pelaksanaan upacara tersebut.
 21. Setiap guru harus hadir disekolah 15 menit sebelum mulai bertugas
 22. Setiap guru yang terlambat tidak dibenarkan memasuki ruangan kelas sebelum melapor kepada Kepala Sekolah
 23. Setiap guru yang berhalangan atau tidak dapat bertugas sebagaimana mestinya harus melaporkannya kepada Kepala Sekolah dan memberikan/menitipkan materi pelajaran kepada petugas piket.
 24. Setiap guru bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan menyerahkan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sekolah tepat pada waktunya
 25. Setiap guru wajib mengikuti setiap rapat di sekolah
 26. Setiap guru wajib melaksanakan tugas piket menurut jadwal yang ditentukan
 27. Setiap guru tidak boleh menerima tamu pada saat sedang mengajar, kecuali pada saat bel istirahat dan berbicara di ruangan guru.
 28. Setiap guru pada awal Tahun Ajaran diwajibkan membuat persiapan berupa Program Tahunan. Program Semester. Silabus Identifikasi SK KD kedalam TM, TMT dan TMTT, Analisis SK / KD (Pemetaan SK /KD sesuai TB), Program Rencana pembelajaran (RPP)., KKM, Jurnal Guru, Analisa Hasil Ulangan, Remedial., dan Pengayaan , Setiap lembaran ujian dan PR/tugas siswa harus diperiksa, diberi nilai dan dibagikan kembali kepada siswa.
 29. Setiap guru wajib mengisi lembaran penilaian fortopolio sebagai bukti fisik pelaksanaan ujian bulanan (ulangan harian) dan tugas setiap bulannya ke kantor Kepala Sekolah
 30. Setiap guru wajib memeriksa jumlah murid pada waktu belajar dan mengisi catatan kelas dengan lengkap.
 31. Setiap guru wajib memeriksa tempat duduk murid saat mengajar dan mengaturnya menurut denah kelas jika ada murid yang duduk tidak pada tempatnya.
 32. Setiap guru dilarang mengoreksi ujian atau PR atau mengerjakan pekerjaan lain pada saat mengajar.
 33. Setiap guru dilarang menyuruh siswa membantu pekerjaan guru seperti mengoreksi, menulis nilai, atau memindahkan pada Leger atau rapot dan lain-lain.
 34. Setiap guru tidak dibenarkan menggunakan bahasa daerah dan wajib memakai bahasa Indonesia di lingkungan sekolah.
 35. Setiap guru dilarang membuang sisa-sisa kapur di lantai atau di sembarang tempat.

36. Setiap guru wajib menjadi contoh memelihara kebersihan/kerapian ruangan kantor guru terutama lingkungan meja masing-masing.
37. Guru yang tidak mematuhi tata tertib atau tidak melaksanakan tugas dengan baik akan mendapat teguran/peringatan berupa lisan, tulisan atau mendapat sanksi terhadap penilaian DP3.
38. Peraturan-peraturan lain yang belum tercantum pada tata tertib ini akan disampaikan secara lisan dan merupakan bagian yang tidak terlepas dari tata tertib ini.



TATA TERTIB SISWA

| POINT | ASPEK PELANGGARAN YANG DINILAI | |
|-------|--------------------------------|--|
| 5 | 1 | Terlambat datang ke kelas pada jam pelajaran |
| | 2 | Terlambat ke masjid pada saat shalat |
| | 3 | Terlambat datang pada kegiatan ekstrakurikuler yang di selenggarakan oleh sekolah |
| | 4 | Makan dan minum bukan pada jam istirahat di kelas |
| | 5 | Tidak memakai seragam yang telah ditentukan |
| | 6 | Aksesoris yang tidak sesuai dengan ketentuan yng ditetapkan |
| | 7 | Terlambat/tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang jelas |
| | 8 | Menempelkan/menuliskan sesuatu yang tidak pada tempatnya |
| | 9 | Membuang sampah/meludah di sembarang tempat |
| | 10 | Keluar kelas tanpa izin saat jam mata pelajaran |
| 25 | 1 | Melompat pagar atau jendela di gedung sekolah |
| | 2 | Membuat keributan atau kegaduhan di dalam kelas, perpustakaan, laboratorium dan masjid sehingga mengganggu suasana belajar dan kekhusyukan ibadah |
| | 3 | Memindahkan dan mengubah alat-alat laboratorium atau sekolah yang telah terpasang tanpa izin |
| | 4 | Menyontek ketika ulangan |
| | 5 | Menggunakan fasilitas sekolah tidak pada waktunya |
| | 6 | Mengadakan kegiatan dengan orang lain di dalam lingkungan sekolah tanpa izin |
| | 7 | meninggalkan pelajaran tanpa alasan yang jelas |
| 75 | 1 | Memberikan keterangan yang tidak benar (berbohong) |
| | 2 | Vandalisme, yakni mengotori atau merusak peralatan dari gedung-gedung di lingkungan sekolah |
| | 3 | Membuat keonaran |
| | 4 | Berkelahi dan menantang perkelahian dengan pihak manapun |
| | 5 | Tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas |
| | 6 | Meninggalkan sekolah tanpa izin |
| | 7 | Membawa telepon genggam |
| | 8 | Membawa masuk orang lain tanpa izin kepala sekolah |
| | 9 | Berdua-duaan (berkhalwat) bukan marhamnya, baik di dalam ataupun di luar sekolah |
| 100 | 1 | Menyebarkan informasi yang tidak sesuai/tanpa informasi yang jelas sehingga menimbulkan kesalahan tanggapan dari berbagai pihak |
| | 2 | Bersikap mengganggu atau mengancam baik secara lisan maupun tertulis pada sesama murid, karyawan, guru-guru dan pimpinan sekolah |
| | 3 | Memfitnah, menipu, mengucilkan teman dan menghasut seseorang aau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan yan tidak terpuji |
| | 4 | Menghina atau merendahkan martabat sesama teman, guru-guru, karyawan atau pimpinan sekolah dihadapan satu atau beberapa orang dalam lingkungan sekolah |

| | | |
|-----|---|--|
| | 5 | Membawa atau mengkonsumsi rokok |
| | 6 | Diketahui mencuri/mengambil barang milik orang lain |
| | 7 | Membawa dan atau menggunakan senjata tajam |
| 200 | 1 | Memalsukan tanda tangan, stempel, kop surat dan atribut-atribut resmi lainnya milik sekolah |
| | 2 | Membawa dan atau mengkonsumsi barang-barang terlarang seperti obat-obatan terlarang, minuman beralkohol dan memabukkan, NAPZA, dll. |
| | 3 | Membawa dan atau menggunakan buku-buku, file, rekaman, instrumen dan media lainnya yang merupakan pornografi yang dapat mengganggu dan meresahkan lingkungan |
| | 4 | Membawa dan atau menggunakan senjata api |
| | 5 | Berjudi, mabuk-mabukan, serta melakukan pelecehan seksual, kontak seksual dan perbuatan asusila lainnya di lingkungan sekolah ataupun diluar sekolah |
| | 6 | Melakukan tindak pidana kejahatan baik di dalam maupun diluar sekolah |
| | 7 | Menyebarkan ajaran yang tidak sesuai dengan agama masing-masing |

Ditetapkan di : Gowa

Tanggal : 3 Januari 2011

Kepala Sekolah,

Zulkifli Saidah, S.Pd.,M.Si

NIP . 19670103 198812 1 002

INSTRUMEN WAWANCARA GURU PPKN

INFORMAN : IBU HAMZIAH, S.Pd

1. Apakah guru menjelaskan mengenai isi dari tata tertib sekolah kepada siswa?
2. Bagaimana guru menyikapi apabila melihat seorang siswa melakukan pelanggaran?
3. Teguran atau sanksi apa saja yang guru berikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran?
4. Apakah dengan pemberian teguran atau sanksi yang diberikan guru mempengaruhi perilaku siswa untuk tidak melakukan pelanggaran?
5. Dalam mendisiplinkan siswa kendala apa saja yang guru hadapi dalam mendisiplinkan siswa?
6. Bagaimana upaya guru dalam menangani kendala yang dihadapi dalam mendisiplinkan siswa?

INSTRUMEN WAWANCARA SISWA

N A M A :

K E L A S :

| No. | Pertanyaan | Ya | Tidak |
|-----|--|----|-------|
| 1. | Saya pernah membaca tata tertib sekolah | | |
| 2. | Saya pernah melakukan pelanggaran | | |
| 3. | Guru PPkn sering menegur siswa yang melanggar | | |
| 4. | Guru PPkn memberi sanksi terhadap siswa yang melanggar | | |
| 5. | Guru PPkn pernah tidak hadir pada jam mengajar | | |
| 6. | Guru PPkn pernah terlambat saat jam mengajar | | |

KUESIONER
UNTUK MENGETAHUI PELANGGARAN-PELANGGARAN TATA TERTIB
YANG DI LAKUKAN SISWA DI SEKOLAH

NAMA :

NIP :

KELAS :

ALAMAT :

1) Apa Anda pernah melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah ?

- a) Ya
- b) Tidak

2) Pelanggaran tata tertip apa yang pernah adan lakukan di sekolah ?

- a) Pelanggaran ringan
- b) Pelanggaran berat

Sebutkan :

.....

.....

.....

.....

3) Apa alasan anda melakukan suatu pelanggaran tata tertib di sekolah ?

Sebutkan :

.....

.....

.....

.....



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanna Makassar Telepon 585257, 586083, Fax 584959 Kode Pos. 90245

Makassar, 11 April 2019

Nomor : 867/ C24 / P-PTK-FAS/DISDIK
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala SMA NEGERI 4 GOWA
di
Tempat

Dengan hormat, berdasarkan surat Kepala Dinas Pemasaran Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan No. 14147/S.01/PTSP/2019 tanggal 09 April 2019 perihal izin penelitian oleh mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : AHMAD SHAHAHUDDIN
Nomor Pokok : 40543003514
Program Studi : Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa S1 UINISMA/IIH Makassar
Alamat : Jl. Su. Alaudin No. 259, Makassar

Yang bersangkutan bermaksud untuk melakukan penelitian di SMA NEGERI 4 GOWA dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:

"PERILAKU GURU PPKN TERHADAP PENEGAKAN TATA TERTIB SEKOLAH PADA SISWA SMA NEGERI 4 GOWA"

Pelaksanaan : 10 April s.d. 25 Mei 2019

Pada prinsipnya kami menerima dan menyetujui kegiatan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPALA BIDANG PPTK FASILITASI PAUD,
DIKBAS, DIKTI DAN DIKMAS

MELVIN SALAHUDDIN, SE, M.Pub & Int. Law, Ph.D
Pangkat : Pembina
NIP : 19750120-200112-1-002

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel (sebagai laporan)
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Makassar - Gowa
3. Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 14147/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : izin Penelitian

KepadaYth,
Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel

di
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMU Makassar Nomor : 1070/05/C.4-VIII/IV/1440/2019 tanggal 09 April 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa peneliti dibawah ini:

Nama : AHMAD SHALAHUDDIN
Nomor Pokok : 10541003614
Program Studi : Pendid. Pancasila dan Kewarganegaraan
Pekerjaan/Umumnya : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sri Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:

" PERAN GURU PPKN TERHADAP PENEGAKAN TATA TERTIB SEKOLAH PADA SISWA SMA NEGERI 4 GOWA "

Yang akan dilaksanakan mulai dari: 10 April s.d 25 Mei 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 09 April 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19610513 190002 1 002

Tersusun 10
1. Revisi LP3M UNISMU Makassar di Makassar
2. Petugan

0840/PTSP 10-04-2019



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448036
Website : <http://simas.sulawesi.go.id> Email : ptsp@sulawesi.go.id
Makassar 90222





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
UPT SMA NEGERI 4 GOWA

Jalan Pendidikan Makmur Ke-1 Dugommangung Telepa (0417) 21213 Gowa 82174

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No.412/041-UPT SMA/04/GOWA/2019

Yang bermula dengan Alhamdulillah

Nama : Zulkifli Saidah, S.Pd., M.Si
Nip : 1967010319881210002
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : UPT SMA Negeri 4 Gowa

Menstrangkan bahwa saya yang terdaftar di provinsi ini

Nama : Ahmad Sholahudin
Nomor Pokok : 105430015514
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa UIN Ar-Raniry Makassar
Alamat : Jl. Sidiyasa No.229, Makassar

Benar telah melakukan penelitian skripsi/jurnal/pertugas akhir Skripsi/Thesis di Sekolah ini dari tanggal 10 April s.d 25 Mei 2019 dengan judul "PEKAN GURU PPKN TERHADAP PENEGAKAN TATA TERTIB SEKOLAH PADA SISWA SMA N 4 GOWA".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 Mei 2019
Kepala Sekolah,

ZULKIFLI SAIDAH, S.Pd., M.Si
Nip. 1967010319881210002







